

Kalak Kampong: Identitas dari Kesadaran Kelas dan Inferioritas di Aceh Singkil-Subulussalam

Kalak Kampong: An Identity Rooted in Class Consciousness and Inferiority in Aceh Singkil-Subulussalam

Zulfikar Riza Hariz Pohan

STIT Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh

*Corresponding Author: zulfikarriza@mail.ugm.ac.id

|| Received: 05-09-2024 || Revised: 23-03-2025 || Accepted: 08-04-2025

Abstract: The term 'kalak kampong' (villagers) in Singkel (Aceh Singkil-Subulussalam) is commonly used by residents of riverbanks (*julu*) or hillsides (*deleng*). On one hand, this term is often interpreted as a hesitation to express their ethnic identity. The accusation of 'cultural hesitation' generally comes from local political elites in Singkel who have formed the ethnic concept known as the Singkil Tribe. In fact, the terminology 'kalak kampong' is an explanation of the power and economic disparities occurring in Singkel due to the persistence of modernism and developmentalism in the Aceh community. 'Kalak kampong' signifies that they feel inferior and not on the same social level as 'urban people' or communities that use the Indonesian language (urban language/Bahasa Indonesia). On the other hand, the term 'kalak kampong' also represents a unifying identity in Singkel, namely the unity as a traditional community that is homogeneous and industrially lagging behind modernization. This research was conducted using a descriptive analysis approach in cultural studies, with data collected through field observations and literature analysis related to ethnic identity and socio-economic dynamics in Singkel. The research aims to examine the relationship between power and economic disparities and the perception of 'kalak kampong' within the Aceh community. The results show that local political elites play a significant role in shaping and reinforcing the ethnic concept of the 'Suku Singkil' for their political and social.

Keywords: Aceh, Inferiority, Singkel, Suku Singkil, Social Class, Modernization.

Citation: Pohan, Z. R. H. (2025). Kalak Kampong: Identitas dari Kesadaran Kelas dan Inferioritas di Aceh Singkil-Subulussalam. *Abdurrauf Social Science*, 2(1). <https://doi.org/10.70742/arsos.v2i1.69>



Abstrak: Penyebutan ‘kalak kampong’ (Orang kampung) di Singkel (Aceh Singkil-Subulussalam) lazimnya digunakan oleh penduduk pinggiran sungai (julu) atau perbukitan (deleng). Di satu sisi, sebutan tersebut sering ditafsirkan sebagai kegagapan untuk menyatakan identitas kesukuan mereka. Tuduhan ‘gagap kebudayaan’ tersebut umumnya berasal dari elite-elite politik lokal di Singkel yang membentuk konsep etnis yang disebut sebagai Suku Singkil. Padahal, terminologi ‘kalak kampong’ merupakan sebuah penjelasan ketimpangan relasi kuasa dan ekonomi yang terjadi di Singkel atas langgengnya modernisme dan pembangunanisme komunitas Aceh. ‘Kalak kampong’ adalah sebutan bahwa mereka merasa lebih rendah dan tak sekelas pergaulannya dengan ‘orang kota’ atau komunitas yang menggunakan bahasa Indonesia (bahasa kota). Di sisi yang lain, penyebutan ‘kalak kampong’ juga merupakan identitas persatuan di Singkel. Penelitian ini berlangsung melalui pendekatan analisis deskriptif pada studi budaya (cultural studies), data dikumpulkan melalui observasi lapangan serta analisis literatur terkait identitas kesukuan dan dinamika sosial-ekonomi di Singkel. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara ketimpangan relasi kuasa dan ekonomi dengan persepsi ‘kalak kampong’ dalam komunitas Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa elite politik lokal memainkan peran signifikan dalam membentuk dan memperkuat konsep etnis ‘Suku Singkil’ untuk kepentingan politik dan sosial mereka.

Kata kunci: Aceh, Inferior, Singkel, Suku Singkil, Kelas Sosial, Modernisasi.

Pendahuluan

Singkel adalah komunitas pinggiran Aceh yang memiliki peran yang tidak sedikit dalam angka ekonomi berbasis industri kelapa sawit dan juga diskursus politik serta kebudayaan di Aceh. Sebagai daerah yang tersusun dari berbagai komunitas, sebagai Jalur dangang, Singkel memiliki banyak percampuran komunitas seperti Pakpak, Batak, Aceh, Mandailing, Minang, dan lain sebagainya. identitas di Singkel tidak hanya dapat disederhanakan menjadi identitas yang multikultural yang disebabkan oleh perdagangan saja (Pohan, 2021). Lebih mendalam, identitas di Singkel terbentuk karena adanya kesadaran kelas antar-komunitas yang terbentuk dari unsur politik dan kepentingan ekonomi (Asnan, 2007). Kesadaran kelas adalah bagian dari kesadaran menjadi Singkel yakni yang melampaui segala bentuk tanda dan simbol-simbol kebudayaan. Kesadaran kelas inilah yang menjadi titik temu dari terbentuknya identitas masyarakat di Singkel, sedangkan jika hanya terpatok pada simbol-simbol kebudayaan saja justru akan terjebak pada pemberhalaan simbol kebudayaan yang mengarah pada esensialisasi. Ada beragam kesadaran kelas yang tampil pada sistem sosial di Singkel, salah-satunya penggunaan bahasa yang berlanjut pada batas-batas dari identitas etnis.

Bahasa di Singkel amat beragam, mulai dari bahasa Nias, bahasa Aneuk Jamee yang bermukim di pesisir sampai bahasa Pakpak (Melalatoa, 2015). Namun belakangan, yang disepakati sebagai ‘bahasa asli pribumi’ Singkel adalah *basa kampong* (bahasa kampung di Singkel) karena penuturnya rata-rata berada di Aceh Singkil-Subulussalam. Ada pula penutur bahasa kampong (*basa Singkel*) yang bermukim di Aceh Tenggara. *Basa kampong* adalah bahasa yang lazimnya dipakai oleh orang pedalaman di hulu (*julu*), pinggiran sungai, perbukitan atau daerah-daerah pelosok. *Basa kampong* yang digunakan di Singkel adalah bahasa yang memakai perpaduan dari banyak bahasa, khususnya bahasa-bahasa dari etnis dan sub-etnis di Sumatera Utara seperti Karo, Batak, Pakpak, Mandailing, Melayu dan lain-lain (Sangti, 1977; Pohan, 2021). *Basa kampong* sering disebut sebagai ‘bahasa *kade-kade*’, karena pengucapan ‘*kade*’ seringkali digunakan oleh orang Singkel untuk menyebut ‘*apa*’. Misalnya dengan pertanyaan, ‘*kade mang embah kona i?*’ (apakah yang kau bawa?), ‘*kade mang kerajomu i?*’ (apa yang sedang kau perbuat), dan ‘*mengkade mu i?*’ (untuk apa-lah itu?). ‘*Kade*’ adalah kata yang amat lazim terselip dalam *basa kampong*, sehingga orang sering kali menyebut ‘bahasa *kade-kade*’ sebagai pengganti ‘*basa kampong*’.

Akan tetapi, terminologi ‘bahasa *kade-kade*’ hanya diucapkan oleh orang yang bukan penutur bahasa Singkel. Orang Nias akan menyebut ‘bahasa *kade-kade*’ kepada orang Singkel, begitupula orang Melayu, Aceh, Pakpak, dan lain-lain. Sedangkan penyebutan ‘*basa kampong*’ diucapkan oleh orang yang memang penutur bahasa Singkel kepada penutur bahasa Singkel asli, mereka yang benar fasih dalam berbahasa Singkel. Sebutan ‘*basa kampong*’ muncul dari kesadaran internal penutur bahasa Singkel, sedangkan sebutan ‘bahasa *kade-kade*’ bermula dari orang yang tidak paham dan bukan penutur bahasa Singkel.

Fenomena penyebutan ‘*basa kampong*’ bagi penutur bahasa Singkel di Singkel menyiratkan adanya dampak politik dan ekonomi sebagaimana dalam pendapat Rahardjo (2002) beberapa penelitian terdahulu mengenai identitas bahasa. Sebab penyebutan ‘*kampong*’ juga diselipkan pada identitas orang Singkel itu sendiri, seperti penyebutan ‘*kalak kampong*’. Penyebutan ‘*kalak kampong*’ bagi gerakan identitas kesukuan di Singkel dianggap menyimpang (untuk tidak mengatakannya sebagai kesalahan fatal) karena dituduh sebagai ketidakpahaman akan identitas etnis.

Permasalahan identitas etnis memang menemukan gaung baru pada masa-masa gencarnya pemekaran wilayah dan memuncaknya politik identitas (Sjaf, 2014). Akan tetapi penyebutan ‘*kalak kampong*’ bagi orang Singkel adalah sebuah diskursus yang lahir sebelum adanya politik identitas, bahkan

penyebutan '*kalak kampung*' telah ada semenjak Singkel berada dalam masa penjajahan Hindia Belanda (Pohan, 2021).

Kampung jika disematkan menjadi kata sifat akan merujuk pada istilah kolot (kampungan), pelosok, amat terbatas, tertutup atau tradisional. Istilah kampung berlawanan dengan kota yang merupakan gambaran masyarakat terbuka nan modern. Menyebut diri sebagai orang kampung dalam wacana hubungan kota dan kampung seringkali menemui persoalan pejoratif bagi penyebutan kampung. Orang kampung adalah mereka yang kolot, berpendidikan terbatas, dan kebanyakan miskin serta minim literasi.

Saat ini segala macam teknologi, seperti listrik, gawai pintar, dan sinyal Wi-fi telah memasuki daerah kampung-kampung di Singkel. Orang-orang kampung mulai terbuka pada informasi, bermain media sosial, juga mengikuti segala arus politik ibukota. Namun, sebutan '*kalak kampung*' di Singkel tidak serta-merta hilang karena masuknya teknologi dan informasi. Karena akar dari sebutan '*kalak kampung*' berasal dari wacana kebudayaan serta bagian dari kesadaran orang Singkel pedalaman, perbukitan dan pinggiran sungai.

Sikap inferior adalah sikap merasa rendah, tidak sebanding dan rasa tidak setara jika dibandingkan dengan pihak yang lebih superior (Fanon, 1963). Pihak yang lebih superior dalam konteks ini adalah orang kota yang modern, berpendidikan tinggi, dan mapan ekonominya. Singkel pedalaman menyebut diri sebagai '*kalak kampung*' dan menyebut bahasa mereka adalah '*bahasa kampung*' merupakan sikap inferior yang terjadi dari dampak ketimpangan identitas, ekonomi, dan relasi kuasa yang pincang.

Kesadaran identitas dibangun dari berbagai fenomena sosial, salah satunya adalah suprioritas satu kelompok yang memegang kendali atas identitas yang tunggal (Said, 2003; Spencer, 2006). Aceh sebagai identitas etnis, lingkup politik dan pusat kebudayaan adalah suprioritas yang paling menonjol dari segala macam komunitas di Provinsi Aceh. Terpusatnya segala pemerintahan di Aceh dan diduduki oleh sebagai besar komunitas Aceh menjadi satu wacana umum bahwa Singkel akan selalu berkubang dengan inferioritas (Pohan, 2021). Sebelum suprioritas Aceh kokoh, suprioritas yang berlipat ada di Singkel, yaitu suprioritas orang Melayu di pesisir Singkel, khususnya di Kecamatan Singkel. Orang Pesisir sejak awal masa pasca-kolonialisme telah banyak yang melek huruf, berpendidikan, dan mempunyai pergaulan yang luas dengan daerah lain. Sedangkan Singkel bagian hulu jauh dari jangkauan dunia luar, karena terbatasnya akses infrastruktur (Purba and Purba, 1997; Asnan, 2007; Meilink-Roelofs, 2016).

Orang Singkel pedalaman perlahan menyadari bahwa mereka tidak setara dengan orang kaya, orang berpendidikan dan orang-orang modern. Sehingga banyak sekali kebudayaan Singkel mengadopsi kesenian Melayu

melalui bahasa dan tarian. Sikap ini memang lazimnya terjadi pada komunitas yang mengalami ketimpangan relasi kuasa, sehingga mereka mencoba menanggalkan identitas asli mereka dan beralih ke identitas yang lebih maju, atau identitas orang kota yang modern (Dobbin, 1983). Penyebutan 'kalak kampong' di Singkel seringkali menjadi subjek yang kaya akan interpretasi dan analisis. Sebagai sebuah terminologi yang digunakan oleh penduduk di sekitar sungai dan perbukitan, makna 'kalak kampong' merujuk pada identitas kesukuan yang terkesan terpinggirkan. Istilah ini tidak hanya mengacu pada asal-usul geografis, tetapi juga mencerminkan keraguan masyarakat dalam mengekspresikan identitas etnik mereka secara utuh. Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang menerima label 'kalak kampong' sering merasa terpinggirkan dalam konteks budaya dan sosial, di mana mereka harus berhadapan dengan stigma sebagai kelompok yang kurang 'berbudaya' dibandingkan dengan komunitas kota.

Dampak penggunaan sebutan 'kalak kampong' terhadap identitas kesukuan dan rasa kepercayaan diri masyarakat setempat tidak bisa dianggap remeh. Pemberian label ini menciptakan rasa inferioritas yang mendalam di antara warga, menurunkan kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Ketimpangan relasi kuasa dan ekonomi menjadi faktor kunci yang memperkuat persepsi negatif ini. Masyarakat Singkel sering merasa terpinggirkan dari arus modernisasi dan pembangunan yang dinikmati oleh komunitas Aceh secara lebih luas. Perasaan inferioritas ini semakin dipertegas oleh perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan sosial yang tidak merata.

Peran elite politik lokal dalam membentuk konsep etnis 'Suku Singkil' juga merupakan aspek penting yang harus diteliti. Elite politik seringkali memanfaatkan terminologi 'kalak kampong' untuk memperkuat kedudukan mereka dan memobilisasi dukungan politik dari masyarakat. Dengan membentuk dan memperkuat konsep etnis yang spesifik, elite politik tidak hanya menciptakan identitas kolektif yang mudah dikenali, tetapi juga memanfaatkan identitas tersebut untuk tujuan politik dan sosial mereka sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite politik lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas mereka sendiri, serta dalam menciptakan dan memperkuat batas-batas etnik di dalam komunitas Singkel.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data kualitatif dari penelitian sebelumnya, juga melakukan pendekatan analisis-deskriptif pada masalah-masalah etnis, politik dan kebudayaan. Studi yang dilakukan terpatok

di Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai dua daerah yang memiliki identitas komunitas Singkel terbanyak di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertolak pada pembahasan studi budaya yang berkembang pada kebudayaan populer di Singkel dan wacana politik yang memanas dengan mengusung tema-tema rognosi dan representasi masyarakat Singkel melalui bahasa masyarakat lokal.

Dalam melacak masalah inferioritas pada identitas komunitas Singkel melalui kata '*kalak kampong*', penelitian ini meneliti dari sisi semiotika budaya. Kajian tersebut mencari akar dari kata '*kalak kampong*'. Sehingga titik yang diberikan dalam kajian ini bersumber pada relasi kuasa seperti ekonomi, hegemoni kebudayaan dari suprioritas dari kebudayaan dan identitas tertentu.

Hasil dan Pembahasan Inferioritas

Pasca-kolonial adalah fase yang cukup menggetarkan, hal tersebut menimbulkan perubahan kebudayaan yang mendalam pada masyarakat bekas jajahan. Umumnya, banyak komunitas masyarakat yang masih belum terlepas sepenuhnya dengan gaya pemerintahan kolonial atau budaya kolonial. Fanon melihat hal tersebut bersumber pada sikap inferior masyarakat bekas jajahan (Fanon, 1963). Masyarakat bekas jajahan melihat kebudayaan dan politik yang dibangun oleh penjajah lebih menjanjikan banyak sekali kemajuan ketimbang masyarakat lokal. Hal-hal yang tampak seperti adanya sistem kesehatan, pendidikan, hukum, keamanan sampai pasar yang dikelola secara baik oleh kolonial (Said, 2003). Hal ini tak jauh berbeda dengan konsep masyarakat lokal yang terperangah melihat kemodernan di kota-kota. Beberapa masyarakat memakai kebudayaan modern yang maju, beberapa mendefinisikan diri sebagai masyarakat yang tertinggal (Dobbin, 1983).

Masyarakat yang merasa tertinggal secara otomatis merasa inferior. Mereka mulai memahami perbandingan antar masyarakat lokal dan pendatang, masyarakat pinggiran dan masyarakat perkotaan. Memahami jarak antara 'kita' dan 'mereka', atau 'maju' dan 'terbelakang' (Fanon, 1963). Titik yang akan disampaikan dalam kerangka studi ini adalah sikap inferior masyarakat pinggiran ketika sedang menyaksikan sendiri perkembangan ekonomi dan tata kelola masyarakat modern yang cenderung terlihat mapan dan terbuka pada segala kemungkinan.

Kesadaran Kelas

Identitas di Singkel terbilang cukup luas, ada percampuran masyarakat yang berjalan tanpa henti. Satu-satunya yang menyatukan percampuran etnis tersebut adalah kesadaran kelas. Umumnya, masyarakat akan bersatu mencapai

satu tujuan jika menyadari akan posisi kelas sosialnya. Terbentuknya identitas kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kesadaran kelas sosial pada masyarakat (Pelzer, 1978). Maka, membicarakan identitas etnis di daerah Singkel sama saja membicarakan sesuatu yang abstrak jika tidak bersumber pada kesadaran kelas, karena kesadaran kelaslah yang membentuk kebudayaan, bahasa dan sistem sosial yang menjadikan Singkel sebagai Singkel. Namun, sebagaimana lazimnya tulisan mengenai Singkel, identitas etnik di Singkel disepakati berada di daerah hulu pinggiran sungai Cinendang (Simpang Kanan) Soraya (Simpang Kiri), atau orang-orang yang merekognisi diri sebagai 'Kalak Kampong'.

Suku Singkil, Pakpak Boang dan Kalak Kampong

Singkel adalah komunitas masyarakat yang memiliki identitas berlapis atau di-antara (*in-between*) yang berada di tengah-tengah antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara yang secara otomatis memberikan dampak orientasi budaya yang cukup kompleks (Pohan, 2021). Hal tersebut menjadi kekuatan dan kelemahan bagi tatanan sosial di Singkel. Dalam konteks politik, kelemahan tampak menonjol, sedangkan dalam hubungan sosial tampak lebih kuat dan teratur. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus terjadinya konflik politik antara komunitas Islam dan Kristen yang menyisakan luka mendalam pada pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil (Pohan, 2021). Juga terdapatnya gesekan antar suku seperti gesekan antar komunitas Singkel dengan komunitas Pakpak dan Jawa. Namun dalam relasi sosial, konflik horizontal tidak pernah ditemukan misalnya di pasar tradisional tidak pernah ditemukan adanya cekcok antara pedagang Muslim dan pedagang Kristiani, atau adanya saling sikut antara pedagang Jawa dengan pedagang Singkel. Posisi di-antara tersebut, faktanya, menyisakan konflik politik yang cukup mendalam. Sehingga, Singkel tidak dapat hanya disederhanakan sebagai daerah perbatasan yang kaya etnis, perpaduan bahasa dan corak masyarakat yang unik. Sebab, kesadaran menjadi Singkel sejak awal adalah kesadaran akan politik, kesadaran kelas sosial dan kepentingan ekonomi. Kemunculan istilah '*kalak kampong*' muncul dari kesadaran politis tersebut.

Identitas etnik memang bukan sesuatu yang dapat dipahami dalam kacamata esensialisasi, melainkan eksistensi (Spencer, 2006; Pohan, 2021). Sebab, identitas manusia yang esensial akan menghambat proses pertukaran kebudayaan yang terjadi di hampir seluruh jenis komunitas masyarakat. Adapula batasan-batasan untuk mendefinisikan etnis, suku, bahasa dan teritorial adalah dampak sudut pandang esensialistik terhadap perkembangan masyarakat. Masyarakat bukanlah benda yang mudah diklasifikasi berdasarkan wujud atau simbol-simbol yang dia bawa. Singkel membentuk dirinya sendiri secara terus-menerus melalui peristiwa-peristiwa, kepentingan politik, akses

ekonomi dan sebagainya yang perlahan membentuk suatu imajinasi menjadi satu komunitas tertentu. Hal ini berbarengan dengan penelitian Benedict Anderson dalam 'Imagined Communities' (Anderson, 2006) yang melihat adanya pembentukan kesadaran pada komunitas. Label sebagai '*kalak kampong*' adalah buah dari kesadaran yang cukup mewakili banyak peristiwa yang telah lampau di Singkel. Membayangkan Singkel pada abad ke-19 sampai abad ke-20 sangat berbeda dengan melihat Singkel di jaman kiwari (abad-21).

Komunitas Singkel pada masa awal periode kolonialisme (1596-1945) menyadari adanya ketimpangan yang cukup dalam pada sirkulasi ekonomi, pendidikan dan politik (Meilink-Roelofs, 2016). Ketimpangan itu kian jomplang jika kawasan hulu pingir sungai dibandingkan dengan kawasan pesisir Singkel. Kawasan pesisir Singkel umumnya memiliki corak masyarakat modern sejak abad ke-17 (Asnan, 2007) karena derasnya arus perdagangan dan pergaulan antar pulau. Masyarakat pesisir Singkel umumnya merekognisi diri sebagai orang Melayu atau Anak Jamee yang berbahasa Melayu Pasar dengan fasih. Sedangkan, di daerah hulu orang Singkel masih digerayangi oleh kemiskinan, buta huruf dan kriminal-kriminal yang selalu gatal tangan melawan pabrik (Pelzer, 1978). Maka, dengan adanya jarak yang lebar antar Singkel pesisir dan Singkel hulu, lahirlah penyebutan '*kalak kampong*' dari masyarakat Singkel hulu. Singkel pesisir tak pernah mau disebut sebagai '*kalak kampong*' sampai saat ini, karena sebutan itu hanya dari dan untuk orang Singkel hulu.

Singkel pesisir pada masa jayanya pelabuhan Singkil memang diisi oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Pada abad ke-20 saat pelabuhan mulai surut perannya, tepatnya masa peralihan dari sistem merkantilisme menuju kapitalisme rente, mereka bertransformasi menjadi mandor pabrik, pedagang atau pejabat pemerintahan (Pelzer, 1978; Meilink-Roelofs, 2016). Hal tersebut karena pada umumnya masyarakat Singkel di pesisir telah lebih dulu memiliki kesadaran untuk sekolah dan peka terhadap perubahan ekonomi-politik global.

Menjelang abad ke-21 mulailah banyak elemen yang membuat Singkel hulu dengan label '*kalak kampong*'-nya semakin khidmat. Pasalnya, Singkel menjadi daerah marjinal dalam Provinsi Aceh. Sejak Indonesia merdeka, Singkel masuk dalam tata pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 1999 Singkel baru berdiri sebagai Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Singkil dan disusul dengan mekarnya Subulussalam dari Aceh Singkil dengan nama resmi Pemerintahan Kota Subulussalam. Dasar dari berpisahanya Singkel dari Aceh Selatan adalah ketidakmerataan akses ekonomi dan hasrat politik elit-elit Singkel untuk membangun daerahnya. Namun, pemekaran bukanlah jawaban akhir dari pemerataan, masih banyak kampung dan daerah yang masih belum mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang merata. Label '*kalak kampong*' masih digunakan oleh masyarakat yang merasa inferior.

Pemekaran daerah tampaknya hanya menyetuh level rekognisi saja, belum sampai ke tahap representasi dan redistribusi ekonomi dan kekuasaan yang merata. Dari hal di atas dapat ditemukan adanya ketimpangan dalam redistribusi, representasi dan rekognisi bagi daerah Singkel yang tertutupi wacana besar Aceh.

Sebagai tandingan dari label '*kalak kampong*', elit-elit politik di Kabupaten Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam mulai mengkampanyekan istilah 'Suku Singkil' sebagai pengganti dari istilah '*kalak kampong*'. Hal ini tentu saja didukung oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik yang sama yaitu menciptakan segregasi etnis dari komunitas Pakpak, Karo, Batak, Jawa, Melayu dan lain-lain. Segregasi etnis tersebut memang sengaja dibentuk untuk meneguhkan identitas politik, yang mana Kabupaten Aceh Singkil memiliki Bupati beretnis Jawa (Dul Musrid periode 2017-2022) dan Walikota Pemko Subulussalam (Bintang Periode 2019-2024) yang beretnis Pakpak.

Meskipun kampanye istilah 'Suku Singkil' itu didukung dengan berbagai acara-acara kebudayaan dan pidato-pidato pejabat daerah, aplikasi dan fungsi nama 'Suku Singkil' itu sendiri memunculkan banyak kejanggalan. Sehingga banyak kalangan yang menolak penyebutan 'Suku Singkil' karena konsep yang dibentuk belum matang benar. Sebagian komunitas di Singkel malah menyebut diri mereka sebagai Pakpak Boang (Viner and Kaplan, 1981). Memang, literatur klasik banyak menyebut Singkel sebagai masyarakat beretnis Pakpak Boang (Sangti, 1977; Viner and Kaplan, 1981; Loeb, 2013; Marsden, 2013), sedangkan literatur klasik yang menyebut 'Suku Singkil' hanyalah Jusuf Melalatoa (Melalatoa, 2015) meskipun 'Suku Singkil' itu bukan disematkan pada orang hulu, melainkan kepada komunitas Singkil di daerah pesisir yang berbahasa Melayu. Dari sisi literatur, penyebutan Suku Singkil itu merupakan sebutan yang ganjil. Satu-satunya sumber referensi yang dijadikan pegangan adalah Qanun tentang Etnis di Aceh. Suku Singkil tidak berasal dari kajian sejarah atau historiografi yang tersusun baik, ataupun dari tulisan-tulisan kajian budaya yang mumpuni, Suku Singkil dicomot dari Pengesahan Pemerintah yang bermuatan sangat birokratis (untuk tidak menyebutnya sangat politis).

Di samping itu, penyebutan '*kalak kampong*' juga masih ada, belum sepenuhnya tersapu oleh konsep 'Suku Singkil'. Umumnya, orang-orang yang menyebut diri sebagai '*kalak kampong*' adalah komunitas Singkel yang paling tradisional atau dengan kata lain komunitas yang berada di kampung dan bergaul selayaknya masyarakat tradisional. Masih memiliki sistem kehidupan sosial yang disokong oleh nilai-nilai tradisional dari adat lokal, masih memakai 'basa kampong' dan menjalankan ritual keagamaan yang juga masih tradisional seperti kenduri, macaken nakan, menggunakan kemenyan ketika berdoa dan lain sebagainya. Mereka masih menyebut hampir segala hal dengan penyebutan

'*kampong*' seperti '*ikan kampong*' (ikan air tawar), '*adat kampong*' (nilai-nilai lokal), '*lagu kampong*' (lagu pop bahasa Singkel) dan '*basa kampong*' (Bahasa daerah Singkel) dan lain-lain.

'Kalak Kampong' Sebagai Bahasa Kritik

Penyebutan '*kalak kampong*' adalah penyebutan paling kritis dan dapat dibaca sebagai bagian dari kritik pembangunan. Jika penyebutan 'Suku Singkil' dan 'Pakpak Boang' adalah bahasa politis yang dihiasi dengan retorika etnis, maka penyebutan '*kalak kampong*' adalah murni berdasarkan kesadaran politik kelas bawah. Mereka, pendaku identitas sebagai *kalak kampong* adalah masyarakat yang tidak dapat disederhanakan sebagai keawaman memahami identitas mereka sendiri. Justru sebaliknya, penyebutan '*kalak kampong*' adalah kesadaran identitas politik yang paling nyata.

Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah dengan predikat 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Predikat tersebut bukan karena Sumber Daya Alam (SDA) di Singkel terbatas, predikat tersebut justru muncul dari banyaknya SDA Singkel namun tak pernah bisa dinikmati secara langsung oleh orang Singkel itu sendiri. Sejak abad ke-16, kekayaan alam Singkel seperti kemenyan dan kamper umumnya dialirkan kepada para penadah di pelabuhan Singkil di pesisir dan pelabuhan Barus (Meilink-Roelofs, 2016). Kayu dari hutan Singkel pun sejak abad ke-20 selalu diimpor ke luar negeri, sampai saat ini pabrik sawit yang cukup banyak di Singkel pun selalu dialihkan ke luar daerah sejak dari masa Onderneming Sumatra Timur dengan pendirian PT Socfindo (Pelzer, 1978). Hal-hal yang tersisa dari SDA tersebut hanyalah konflik lahan, kerusakan lingkungan dan pengelolaan tenaga kerja pabrik yang bermasalah (Pohan, 2021).

Tak mengherankan, jika komunitas Singkel kelas bawah merasa inferior jika dihadapkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup pesat di perkotaan, sedangkan mereka yang hidup di kampung-kampung tidak dapat menikmati apa-apa yang ada di daerah perkotaan. Masalah ini menjadi hal yang cukup penting dalam wacana politik di Aceh. Ada relasi kuasa yang timpang antar daerah kota dan daerah pinggiran seperti Singkel. Kebudayaan hanya tumbuh untuk daerah perkotaan, atau masyarakat yang mengenyam pendidikan dan berkecukupan secara ekonomi. Sebaliknya, kelas sosial yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dan tak berkecukupan secara ekonomis mengenal konsep kebudayaan melalui cara mereka sendiri. Kebudayaan yang dibentuk di Singkel kebanyakan adalah kebudayaan yang dibentuk oleh kelas sosial menengah ke bawah. Penyebutan *kalak kampong* adalah salah satu penyebutan yang berakar pada kebudayaan kelas sosial menengah ke bawah.

Kegagalan Konsep Suku Singkil

Di sisi lain, penyebutan Suku Singkil sendiri tumbuh dari kesadaran politik, para pengagasnya adalah aktor-aktor politik yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam. Salah satunya adalah Muadz Vohry yang merupakan mantan wakil bupati Aceh Singkil dengan Makmur Syahputra Bancin periode 2000-2005. Selanjutnya, Muadz Vohry mulai merumuskan buku tentang kriteria Suku Singkil pada tahun 2013 dengan menerbitkan buku berjudul '*Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*'. Muadz Vohry tidak sendirian, ada beberapa kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh elite politik yang ikut tergabung ke dalam pembentukan konsep 'Suku Singkil', dengan perkumpulan yang disebut sebagai YAPKESSI (Yayasan Pelestarian Kebudayaan Suku Singkil). Anggota YAPKESSI rata-rata diisi oleh anak muda yang melek politik (dan jelas memiliki hasrat politik yang cukup kuat), orang tua yang memiliki relasi dengan politisi/kepala dinas yang bersama-sama membangun konsep kesukuan yang disusun secara sistematis.

Pemahaman mengenai Suku Singkil berkembang dan dilanjutkan dengan 'propaganda' kebudayaan yang berbentuk *flyer* (selebaran di media sosial), acara diskusi dan berbagai kegiatan lainnya yang mengusung pembahasan mengenai Suku Singkil, seperti kerajaan Suku Singkil, makanan khas Suku Singkil, pakaian khas Suku Singkil dan lain sebagainya. Memang, pembahasan tersebut seringkali berlangsung alot, karena penggambaran mengenai Suku Singkil dan sejarahnya seringkali tersandung pada mistifikasi dan amat subjektif sehingga terkadang tersandung pada sikap primordial.

Salah satu kasus yang cukup meresahkan adalah pertikaian yang terjadi antara kelompok yang mengaku sebagai Suku Singkil dan kelompok yang mengaku Suku Pakpak di Kota Subulussalam. Permasalahan disulut dari rencana pembangunan Rumat Adat Pakpak oleh Walikota Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang. Sontak, rencana itu dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menggeser Suku Singkil yang mendaku sebagai pribumi di Tanah Singkil (Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Subulussalam). Ditambah lagi, Walikota Subulussalam terpilih memiliki darah Pakpak. Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dan tokoh masyarakat (AcehTribunNews/2019/11/12), yang diikuti oleh perdebatan di sosial media, yang akhirnya memicu ujaran kebencian pada kedua belah pihak. Salah satu pendukung konsep Suku Singkil dilaporkan oleh komunitas Suku Pakpak.

Etnisitas di Singkil telah amat menyatu dengan politik, keduanya hampir tak dapat dibedakan. Penyebutan Suku Singkil terbukti tidak membawa wacana eksistensialistik, melainkan hanya terbatas pada wacana politik yang essentialistik. Sedangkan di sisi lain, penyebutkan *kalak kampong* terbukti

berasal dari pemahaman yang mendalam pada kesadaran kelas sosial dan berkarakter eksistensialistik. Konsep Suku Singkil adalah konsep identitas yang dibangun untuk gagal, motif yang diciptakannya terbukti hanya bergantung pada wacana politik dan kebudayaan yang bersifat material. Selebihnya, konsep tersebut hanya menyelipkan romatisme masa lalu tentang kerajaan-kerajaan Singkil dan lain sebagainya, padahal kerajaan-kerajaan Singkel yang diceritakan dengan penuh kegemilangan *a la* dongeng 1001 malam hanyalah kelompok feodal yang menarik upeti dari masyarakat kelas bawah. Mereka merampok nilai kerja dan SDA masyarakat kelas bawah. Tapi, masyarakat kelas bawah cukup pandai melawan dengan halus yakni dengan menciptakan istilah '*kalak kampong*'.

Kesimpulan

Kesadaran kelas di Singkel adalah bagian dari pembentukan kebudayaan massa. Label sebagai kalak kampong adalah bagian dari kesadaran kelas paling dasar di Singkel, yang mana dapat diterjemahkan kepada dua makna yaitu sebagai sikap inferioritas dan sebagai kritik pembangunan di Provinsi Aceh yang amat sentralistik. Namun, label '*kalak kampong*' seringkali menjadi bahan olok-olokan untuk mengejek satu kalangan tertentu sebagai masyarakat yang kolot, anti-modernisasi dan bahkan dianggap sebagai masyarakat tradisional yang memiliki kepercayaan pada hal-hal klenik. Sehingga sebutan '*kalak kampong*' selalu menjadi citra bagi satu kelompok yang mengalami kemuduruan atau setidaknya stagnasi.

Sebagai label yang bersumber dari wacana politis, *kalak kampong* kemudian direspon dengan bingkai yang berbeda-beda, ada yang mencemooh, ada yang mengkritik adapula yang mencoba merekonstruksi label baru menjadi label yang lebih menandakan pada identitas etnis. Di sisi lain adanya label-label tandingan seperti 'Suku Singkil' dan '*kalak Singkil*' dianggap lebih representatif untuk menyebutkan identitas daerah. Namun meskipun ada beberapa label-label tandingan yang disosialisasikan melalui seminar, festival budaya dan propaganda-propaganda politik, penyebutan '*kalak kampong*' masih tetap digunakan oleh penutur bahasa Singkel (*basa kampong*) sebagai bentuk dari kesadaran posisi mereka yang merekognisi diri sebagai masyarakat yang terpinggirkan, sampai kini. Dan memang sebagian besar masyarakat di Singkel lebih nyaman memakai label '*kalak kampong*', walaupun tentu saja mereka belum tentu menyukai label itu.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2006) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised Edition. London: Verso.
- Asnan, G. (2007) *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dobbin, C. (1983) *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847*. London: Curzon Press.
- Fanon, F. (1963) *The Wretched of The Earth*. New York: Grove Press.
- Loeb, E.M. (2013) *Sumatera: Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Marsden, W. (2013) *Sejarah Sumatera*. Depok: Komunitas Bambu.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. (2016) *Perdagangan Asia & Pengaruh Eropa di Nusantara: Antara 1500 dan Sekitar 1630*. Edited by R. Amelina. Translated by Tim Komunitas Bambu. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Melalatoa, M.J. (2015) 'Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia'. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelzer, K.J. (1978) *Toeang Keboen dan Petani (Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947)*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Pohan, Z.R. (2021) *Sejarah Tanpa Manusia: Historiografi Singkel Abad VII-XXI*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Pohan, Z.R. (2021) 'When Adat Laws and Shariah Islam Became Frogs in the Well: Critical Response to UU Pemerintahan Aceh, and Aceh's Qanun for Tanah Ulayat in Aceh Singkil', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol 12 No 2 (2020).
- Purba, O. and Purba, E.F. (1997) *Migrasi Spontan Batak Toba (Merserak); Sebab, Motif dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba*. Medan: MONORA.
- Rahardjo, M. (2002) *Relung-relung Bahasa: Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Said, E.S. (2003) *Culture and Imperialism*. London: Vintage.
- Sangti, B. (1977) *Sejarah Batak*. Balige: Sianipar Company.
- Sjaf, S. (2014) *Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Spencer, S. (2006) *Race and Ethnicity: Culture, Identity, and Representation*. New York: Routledge.
- Viner, A.C. and Kaplan, E.L. (1981) 'The Changing Pakpak Batak', *Jimbras*, Vol 54, p. 94.